

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Dalam upaya meningkatkan ekonomi, pemerintah sudah menjalankan beberapa program namun banyak program yang tidak memberikan hasil. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, pemerintah menemukan satu program baru yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa yakni lewat pembentukan kelembagaan perekonomian yang dimana masyarakat desa yang mengelolanya. Semenjak tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali membangun strategi Gerbang Sadu Mandara selaku ajang bersama bagi masyarakat desa demi mengembangkan diri dan tempatnya. Selain itu Gerbang Sadu Mandara juga sebagai strategi atau rencana yang mempunyai maksud menangani kemiskinan dan pengangguran yang terdapat di wilayah setempat.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan sebutan BUMDes ialah suatu program desa yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap pedesaan dan dikelola langsung oleh pemerintahan dan masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian desa. BUMDes didirikan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa”. BUMDes didirikan bermaksud agar menguatkan penghasilan desa, mengembangkan ekonomi desa dan ketenteraman masyarakat pedesaan. Pendirian BUMDes pada tiap desa berdasarkan keputusan dari masing-

masing masyarakat desa sehingga unit usaha BUMDes bermacam-macam selaras dengan kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh tiap-tiap pedesaan.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki BUMDes dengan jumlah 124 BUMDes yang tersebar di setiap masing-masing kecamatan Buleleng. Tujuan pendirian BUMDes di masing-masing desa tersebut untuk memajukan perekonomian di masing-masing desa. Namun pada sisi lain, terdapat BUMDes yang bermasalah di Kabupaten Buleleng yang terjadi karena beberapa sebab salah satunya yaitu adanya indikasi kecurangan pada pengelolaan BUMDes. Berdasarkan observasi awal peneliti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, peneliti memperoleh data terkait BUMDes yang dinyatakan bermasalah Per Januari 2021 sebagai berikut.

**Tabel 1. 1**

**Data BUMDes Yang Bermasalah Di Kabupaten Buleleng**

No	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan
1	Amartha	Patas	Gerokgak
2	Jagat Dhita	Pengulon	Gerokgak
3	Jangkar Mas	Celukan Bawang	Gerokgak
4	Mandiri Bersama "GSM"	Mayong	Seririt
5	Loka Mandara	Lokapaksa	Seririt
6	BUMDesa Bongancina	Bongancina	Busungbiu
7	BUMDesa Gema Matra	Pucaksari	Busungbiu
8	Widya Sari	Bengkel	Busungbiu
9	BUMDesa Sadu Amerta	Tirtasari	Banjar
10	Sucia Dhana Subiksa	Pedawa	Banjar
11	BUMDesa Tunas Kerta	Tigawasa	Banjar
12	Pandan Harum	Selat	Sukasada
13	BUMDesa Wana Amertha	Galungan	Sawan
14	BUMDesa Banwa Bharu	Bebetin	Sawan
15	Muncul Sari Aji	Sudaji	Sawan
16	Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan
17	BUMDesa Kusuma Asri	Bungkulan	Sawan
18	BUMDesa Sari Nadi	Tambakan	Kubutambahan
19	BUMDesa Karya Sari	Pakistan	Kubutambahan
20	Praja Sidhi Yowana	Kubutambahan	Kubutambahan

21	Santhi Amertha	Bukti	Kubutambahan
22	Kertha Sari Waringin	Julah	Tejakula
23	BUMDesa Teja Kusuma	Tejakula	Tejakula

(Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng)

Bersumber dari data yang terdapat diatas, sehingga bisa diketahui bahwa diperoleh 23 BUMDes yang bermasalah dari masing-masing kecamatan yang berbeda di Kabupaten Buleleng. Selain itu, pada media online juga sudah tersebar beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa BUMDes. Seperti yang diberitakan oleh Balitribune.co.id pada 16 Oktober 2019, menyatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Amartha Desa Patas terindikasi tidak beres atau sedang sakit. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Koordinator Tim Penyehatan BUMDes Amartha Komang Widiartawan. Pengelola BUMDes sudah melakukan penyelewengan keuangan anggaran BUMDes sejumlah Rp. 1,2 miliar, yang dimana sebagian pengelola atau pegawai tersangka menggunakan anggaran BUMDes dengan menganjurkan kredit tanpa uang muka atau jaminan. Penyimpangan kecurangan itu terbongkar setelah diadakannya rapat desa.

Selain kasus tersebut, ternyata ada juga kasus di BUMDes Desa Tirtasari Kecamatan Banjar yang ikut tersebar di media online. Seperti yang diberitakan oleh bali.idntimes.com pada 4 Maret 2021, yang menyatakan bahwa ketua BUMDes Desa Tirtasari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tentang dugaan penyalahgunaan dana BUMDes Sadu Amertha. Menurut keterangan dari Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Polres Buleleng, AKP Suseno, tindakan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2014 hingga 2017 tersangka diduga melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan nama-nama orang lain. Selain itu tersangka tidak menyetorkan

uang pelunasan kredit yang diberikan oleh nasabah ke BUMDes tersebut. Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, BUMDes Sadu Amertha telah mengalami kerugian sebesar Rp. 87,63 juta.

Dibalik tujuan pendirian BUMDes ternyata tidak bisa terhindar dari adanya kecurangan. Kecurangan (*fraud*) yang terjadi akhir-akhir ini sudah menarik perhatian dari media sosial dan lain sebagainya. Kecurangan yakni penipuan yang memang secara terencana dilakukan oleh pihak berada pada organisasi keuangan sebagainya. Akibat adanya oknum yang melakukan kecurangan pada organisasi tersebut menyebabkan suatu kerugian yang tidak disadari bagi pihak organisasi keuangan tetapi menguntungkan bagi oknum yang melakukan kecurangan tersebut. Adanya suatu permasalahan pada beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh adanya kesenjangan pengetahuan keadaan perusahaan antara pengelola dan pengawas, yang mana ketua atau pengelola mengetahui keadaan perusahaan yang lebih banyak ketimbang pengawas, sehingga menimbulkan permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang mengelola BUMDes. Kecurangan ialah penipuan di dalam bidang keuangan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud mencuri kekayaan ataupun kekuasaan seseorang ataupun kelompok lainnya (Solehah, 2020). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memaparkan kecurangan akuntansi yakni: (1) salah saji yang tampak dalam kecurangan pada pelaporan keuangan yakni penghapusan melalui terencana total ataupun pembongkaran pada laporan agar mengelabui pemakai, (2) salah saji yang tampak pada aktivitas kurang sewajarnya kepada modal yang berhubungan pada perampasan aktiva entitas.

Kecurangan yang telah terjadi bisa disebabkan karena beberapa faktor, sehingga di penelitian ini hendak menggunakan faktor-faktor dalam teori *fraud hexagon* yang terbaru yang dimana kebaruan mengenai teori *fraud* yang dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas (2019). Peneliti memakai teori yang terbaru dikarenakan ingin meneliti kecurangan yang terjadi melalui enam komponen yang terdapat dalam teori terbaru dengan komponen tambahan kolusi. Vousinas (2019) dalam teorinya yaitu *fraud hexagon* yang menyatakan bahwa kecurangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *stimulus* (tekanan) yang dimana adanya tekanan kebutuhan keuangan atau kebutuhan yang mendesak lainnya yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kecurangan, *capability* (kemampuan) merupakan sifat dan kemampuan individu dalam memainkan peran utama dalam tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu agar dapat melewati celah itu, *opportunity* (peluang) merupakan kemampuan untuk melakukan kecurangan ketika terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal sehingga bisa mendorong seseorang agar melaksanakan tindakan penyelewengan dalam perusahaan tersebut, *rationalization* (rasionalisasi) merupakan yang berkaitan dengan pembenaran penipuan yang dimana individu merasa sudah berbuat lebih untuk perusahaan sehingga individu terdorong untuk mengambil tindakan kecurangan, *arrogance* (ego) merupakan sikap kerakusan individu yang yakin ialah pengendalian internal tidak berperan selaku individu karena individu tersebut merasa kedudukannya yang lebih tinggi dari pada pihak lainnya, dan *collusion* (kolusi) yakni persekutuan yang dilaksanakan sejumlah golongan semacam golongan pribadi terhadap golongan diluar perusahaan ataupun antar karyawan di perusahaan.

Pengukuran dalam elemen teori *fraud hexagon* belum bisa diteliti secara langsung, sehingga masing-masing dari komponen teori *fraud hexagon* diperlukan proksi sebagai pengukur elemen tersebut. Proksi yang dipakai sebagai pengukur masing-masing elemen dari teori *fraud hexagon* dalam penelitian ini yaitu pada komponen tekanan (*stimulus*) diproksikan pada variabel kesesuaian kompensasi, komponen kemampuan (*capability*) diproksikan dengan variabel asimetri informasi, komponen peluang (*opportunity*) diproksikan dengan variabel sistem pengendalian internal, komponen rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan variabel budaya organisasi, komponen ego (*arrogance*) diproksikan dengan variabel moralitas individu, dan komponen kolusi (*collusion*) diproksikan dengan perilaku tidak etis. Variabel selaku proksi pada penelitian ini dipakai karena alasan peneliti ingin mengetahui apakah variabel-variabel tersebut mempengaruhi kecurangan serta jika dibandingkan hasil penelitian terdahulu terkait variabel sebagai proksi tersebut masih adanya hasil penelitian yang tidak sama. Sehingga variabel-variabel tersebut penting untuk digunakan pada penelitian ini.

Penelitian terkait aspek yang dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan sudah dilaksanakan peneliti terdahulu dan membuktikan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Desviana (2020) terkait tentang analisis kecurangan pada pengelolaan dana desa dalam perspektif *fraud hexagon*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya variabel tekanan ketaatan, kompetensi, perilaku tidak etis dan keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Sedangkan variabel budaya organisasi dan kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Kusumosari (2020) terkait tentang analisis kecurangan laporan keuangan melalui *fraud hexagon* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2018. Hasil penelitian membuktikan variabel target keuangan, stabilitas keuangan, koneksi politik, *state owned enterprises*, *ineffective monitoring*, rasionalisasi dan CEO *duality* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel tekanan eksternal, pendidikan CEO dan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Sari (2021) terkait tentang *financial statements fraud* dengan pendekatan *Vousinas fraud hexagon* model tinjauan pada perusahaan terbuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *personal financial need*, *nature of industry*, *arrogance* dan *collusion* berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan. Sedangkan variabel *financial stability*, *external pressure*, *financial target*, *effective monitoring*, *capability* dan *rationalization* tidak berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan.

Berlandaskan pada beberapa hasil penelitian terdahulu terkait aspek yang mempengaruhi kecurangan, ternyata terdapat hasil yang berbeda-beda. Kemudian keterbaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan pada tahun yang dimana pada situasi pandemi Covid-19 yang masih sering diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, penelitian ini juga dilakukan

pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng karena terdapat 23 BUMDes yang bermasalah. Alasan pemilihan tempat penelitian ini karena Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang tergolong memiliki jumlah BUMDes yang banyak di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena, teori yang berkembang, serta penelitian sebelumnya, sehingga peneliti ingin melaksanakan penelitian yang sejenis terkait teori *fraud hexagon*. Penelitian ini hendaknya bisa berguna pada bidang akuntansi, karena penelitiannya termasuk pengembangan yang memakai teori *fraud hexagon*. Maka peneliti tertarik untuk membuat judul penelitian **“Kecurangan Pada BUMDes Berdasarkan Teori *Hexagon* (Studi Kasus Pada BUMDes Se-kabupaten Buleleng)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bersumber dari data yang didapatkan peneliti pada media online dan Dinas PMD Kabupaten Buleleng, kedatangan BUMDes yang bermasalah Per Januari Tahun 2021.
2. Terdapat laporan keuangan yang tidak akuntabel yang mengindikasikan adanya kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Terdapat permasalahan yang mengindikasikan adanya kecurangan pada 23 BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diketahui bahwa permasalahan penelitian ini cukup luas. Sehingga penelitian ini difokuskan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
6. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan *fraud hexagon*, yang menghasilkan variabel independen berupa komponen tekanan (*stimulus*) diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi, komponen kemampuan (*capability*) diproksikan dengan variabel asimetri informasi, komponen peluang (*opportunity*) diproksikan dengan variabel sistem pengendalian internal, komponen

rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan variabel budaya organisasi, komponen ego (*arrogance*) diproksikan dengan variabel moralitas individu, dan komponen kolusi (*collusion*) diproksikan dengan variabel perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini hendaknya bisa menambahkan keahlian serta wawasan terkait kecurangan berdasarkan teori yang terbaru teori *hexagon*.

### b. Bagi Pihak BUMDes

Hasil penelitian ini hendaknya bisa dijadikan pertimbangan kepada pihak BUMDes untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan pemahaman terkait peran penting pengungkapan kecurangan serta aspek yang bisa mempengaruhi kecurangan.

### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini hendaknya bisa dijadikan tambahan acuan bagi peneliti selanjutnya pada bidang akuntansi selaku materi untuk memahami penelitian yang serupa serta materi pada pengembangan penelitian tahap lanjut.